

BANKIR KOTOR: BAGAIMANA HSBC MENDANAI PERUSAKAN HUTAN UNTUK KELAPA SAWIT



© Infansasti / Greenpeace

HSBC, yang berkantor pusat di Inggris, saat ini adalah salah satu penyedia jasa keuangan terbesar bagi industri kelapa sawit.¹ HSBC memiliki kebijakan yang lengkap mengenai komoditas kehutanan dan pertanian (termasuk bagian-bagian kebijakan tertentu mengenai kelapa sawit).² Mereka mengklaim bahwa kebijakan tersebut ‘melarang pembiayaan (yang menyebabkan) deforestasi’,³ tetapi laporan terbaru Greenpeace menunjukkan banyak perusahaan yang mereka dani terus menghancurkan hutan.

HSBC TERUS MENYOKONG PERUSAKAN LINGKUNGAN DAN EKSPLOITASI

Meskipun telah menyatakan komitmennya terhadap keberlanjutan, di tahun-tahun belakangan ini, HSBC memulai atau tetap mempertahankan hubungan finansial (termasuk menyediakan atau mengatur pinjaman) dengan perusahaan-perusahaan dan kelompok-kelompok usaha yang mengelola konsesi-konsesi kelapa sawit di Indonesia dengan cara-cara yang sangat tidak berkelanjutan.

Sejak tahun 2012, bank ini telah terlibat dalam mengatur pinjaman dan fasilitas kredit lainnya yang mencapai US\$16,3 milyar untuk enam perusahaan yang diulas dalam laporan Bankir Kotor oleh Greenpeace, serta hampir US\$2 milyar dalam bentuk obligasi korporat. Dalam beberapa kasus, rincian kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pemberi pinjaman (termasuk HSBC) dapat diakses, namun pada kebanyakan kesepakatan bisnis, informasi tersebut tidak tersedia.

Seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi kasus ini, selain kebijakan HSBC yang tidak memadai, bank ini juga memberikan layanan kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar kebijakan-kebijakan mereka. terkaitnya HSBC dengan beberapa perusahaan yang paling

merusak di sektor ini, mengakibatkan risiko serius terhadap reputasi HSBC sendiri, selain risiko keuangan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit.

Serangkaian bukti bahwa perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diterima, tersedia luas di ranah publik: perusahaan-perusahaan ini telah ditegur atau dibekukan operasinya oleh RSPO, telah disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai penyebab kebakaran yang tak terkendali,⁴ dan/atau menjadi subyek dari banyak laporan kritis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sosial dan lingkungan. Bahkan uji kelayakan yang paling mendasar pun terhadap perusahaan-perusahaan ini, seharusnya telah memberikan peringatan, yang menimbulkan pertanyaan: apakah HSBC gagal dalam menerapkan seluruh kebijakannya atau hanya gagal untuk menerapkan pengawasan yang memadai ketika menilai apakah nasabah saat ini atau calon nasabah mereka mematuhi kebijakan tersebut?

RINGKASAN STUDI KASUS

BUMITAMA AGRI LTD

HSBC membantu pengaturan dua pinjaman untuk Bumitama (satu pinjaman di tahun 2012, yang lainnya di tahun 2013) dengan nilai total sebesar US\$190 juta.

Dalam satu dekade terakhir, Bumitama telah menggunduli hutan dan menanam lebih dari 160.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan,⁵ termasuk ribuan hektar hutan hujan tropis, dan habitat Orangutan serta lahan gambut.

Beberapa LSM telah menyampaikan lima pengaduan terhadap Bumitama ke RSPO sejak tahun 2012, atas dugaan bahwa Bumitama menghancurkan habitat Orangutan, menanam secara ilegal, beroperasi tanpa izin yang sesuai dan gagal untuk memberi kompensasi kepada masyarakat setempat yang tanahnya mereka kembangkan.

Pada tahun 2012, HSBC adalah salah satu dari dua bank yang membantu penjualan saham Bumitama di bursa efek Singapura. Dalam prospektusnya,⁶ Bumitama mengaku adanya 'program penanaman yang agresif' dan mengklaim telah menguasai sekitar 76.000 Ha – wilayah yang lebih besar dari Singapura – yang telah ditanami tanpa hak atas lahan sebagaimana yang disyaratkan atau izin dari Pemerintah Indonesia – yang jelas melanggar Undang-Undang dan peraturan perkebunan di Indonesia.

GOODHOPE ASIA HOLDINGS LTD

HSBC merupakan bagian dari konsorsium perbankan yang memberikan tiga pinjaman kepada Goodhope (seluruhnya di tahun 2014) dengan nilai total US\$400 juta.

Masyarakat setempat dan beberapa LSM telah menyampaikan pengaduan kepada RSPO terhadap Goodhope, dengan tuduhan merampas lahan dan merusak hutan di Papua, termasuk menghancurkan hutan hujan, lahan gambut dan kebun sagu milik masyarakat setempat. Goodhope telah menggunakan aparat keamanan negara untuk mengamankan perkebunan PT Nabire Baru dan masyarakat telah mengeluh tentang kekerasan atau intimidasi yang ditimbulkannya, yang seringkali ditargetkan kepada orang-orang setempat yang menentang perkebunan.

IOI GROUP

HSBC merupakan joint lead manager untuk penerbitan satu obligasi korporat untuk IOI (di tahun 2012) dengan total nilai sebesar US\$600 juta.

IOI Group adalah perusahaan kelapa sawit terbesar ketiga di dunia. Kelompok usaha ini memiliki 31% saham Bumitama Agri Ltd.⁷ Deforestasi dan pengeringan lahan gambut serta pembukaan hutan habitat Orangutan yang dilakukan IOI pertama kali diungkap oleh Greenpeace pada tahun 2008.⁸

Pada tahun 2010, sebelas LSM secara bersama menuduh IOI menghancurkan lahan gambut, hutan bernilai konservasi tinggi (NKT) di konsesi-konsesinya di Kabupaten Ketapang, dan secara ilegal merusak hutan di luar areal konsesi PT Berkat Nabati Sejahtera miliknya. Pada tahun 2016, setelah pengaduan RSPO lainnya, IOI diskors oleh RSPO.⁹ Akibatnya, belasan perusahaan termasuk Unilever, Nestle dan Kellogg berhenti membeli minyak sawit dari IOI.¹⁰

NOBLE GROUP

HSBC membantu mengatur kredit dan pembiayaan untuk Noble Group dengan nilai total hampir mencapai US\$3,9 milyar di tahun 2013-2016, termasuk memberikan kontribusi sedikitnya US\$90 juta pada sebuah sindikat kredit kepada Noble senilai US\$1 milyar di tahun 2016. HSBC juga bertindak sebagai bookrunner untuk penerbitan obligasi korporat senilai US\$400 juta di tahun 2014.

Noble merupakan produsen dan pedagang komoditas internasional. Divisi perkebunannya membeli dua perkebunan kelapa sawit di Papua, satu pada tahun 2010 dan satu lagi pada tahun 2011, mencakup areal seluas 70.705 Ha. Survei tutupan lahan Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa ketika Noble membebaskan lahan tersebut, sebagian besar arealnya masih tertutup hutan hujan namun pada tahun 2015 hampir 15.000 Ha telah dibuka dan ditanami kelapa sawit.¹¹ Masyarakat setempat menentang pembangunan tersebut dan menyalahkan perusakan hutan oleh Noble sebagai penyebab banjir yang menghantam desa mereka bulan Oktober 2014.¹² Deforestasi besar-besaran terus berlanjut di salah satu perkebunan sampai tahun 2016.

POSCO DAEWOO CORPORATION

HSBC membantu mengatur enam buah pinjaman (lima pinjaman di tahun 2012, satu pinjaman di tahun 2013) kepada berbagai divisi POSCO Daewoo dengan nilai total sebesar hampir US\$2,4 milyar, di mana HSBC menyumbang sedikitnya US\$269 juta.

POSCO Daewoo adalah perusahaan multinasional Korea. Mereka bukan anggota RSPO, tetapi menguasai sebuah perkebunan kelapa sawit di Papua. Hampir 20.000 Ha hutan primer dan sekunder di dalam areal konsesinya telah dihancurkan sejak tahun 2011 dan pembukaan lahan terus berlanjut sepanjang tahun 2016. POSCO Daewoo dituduh melakukan praktik tebang-dan-bakar setelah kebakaran terjadi berulang kali di areal yang telah mereka buka baru-baru ini. Pimpinan masyarakat setempat menuduh POSCO Daewoo mengambil tanah mereka tanpa memberikan kompensasi yang pantas.

SALIM GROUP / INDOFOOD

HSBC membantu mengatur dua buah pinjaman senilai total US\$360 juta untuk perusahaan-perusahaan dalam Salim Group (satu pinjaman di tahun 2013, satu lagi di tahun 2014), di mana mereka menyumbang sedikitnya US\$40 juta. HSBC juga bertindak sebagai joint lead manager dan bookrunner untuk dua penerbitan obligasi korporat (satu di tahun 2012, satu di tahun 2013) dengan nilai total sebesar US\$800 juta.

Salim Group adalah kelompok usaha dengan struktur longgar yang dipimpin oleh Antoni Salim. Kelompok usaha ini mencakup Indofood, salah satu perusahaan pangan dan pertanian terbesar di Indonesia dan juga perusahaan kelapa sawit swasta terbesar di Indonesia yang belum memiliki kebijakan 'Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi' yang menyeluruh. Telah terjadi perusakan hutan yang luas di perkebunan-perkebunan milik Indofood di Kalimantan.¹³

Pada tahun 2013 sebuah LSM konservasi Orangutan memperingatkan terjadinya perusakan hutan di sebuah perkebunan milik Salim Group di Kalimantan.¹⁴ Mereka merekam video sarang Orangutan dan secara terpisah, sebuah bulldoser sedang menggunduli hutan. Perusakan terus berlanjut dan LSM tersebut harus menyelamatkan beberapa ekor Orangutan, termasuk dua bayi Orangutan. Wilayah perkebunan tersebut saat ini telah sepenuhnya habis dibuka.

Indofood juga dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia termasuk pelanggaran hak-hak buruh dan penggunaan buruh anak di perkebunan miliknya.¹⁵ Pada bulan September 2016, auditor RSPO menegaskan bahwa Indofood terus-menerus melanggar banyak Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, termasuk tidak membayar upah minimum.¹⁶

TANGGAPAN PIHAK PERUSAHAAN

Ketika Greenpeace menyampaikan tuduhan-tuduhan dalam laporan ini kepada HSBC, pihak bank menolak berbicara tentang pelanggan tertentu, mengatakan bahwa 'kerahasiaan pihak klien membatasi kami untuk memberikan komentar terhadap hubungan-hubungan tertentu.'¹⁷ Pernyataan HSBC di bulan Oktober 2016 tentang perubahan iklim, sungguh-sungguh mengklaim bahwa pihak bank 'telah berhenti memberikan layanan perbankan kepada beberapa nasabah (misalnya perusahaan di sektor kehutanan)' berdasarkan standar bank, namun mereka tidak menyebutkan perusahaan mana saja yang dimaksud.¹⁸

Seiring dengan terbukanya hubungan HSBC dengan perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, bank tersebut harus menjelaskan bagaimana mereka berniat merevisi kebijakannya yang sudah ada agar menjadikannya sejalan dengan standar 'No Deforestasi, No Gambut, No Eksploitasi' (NDPE) yang telah menjadi norma bagi sektor-sektor lain. HSBC harus transparan tentang perusahaan-perusahaan kelapa sawit (dan konglomerasi yang berminat pada kelapa sawit) dalam basis kliennya, harus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini dan menetapkan tenggat waktu bagi mereka untuk menerapkan kebijakan NDPE yang mencakup keseluruhan operasi mereka.

PRINSIP-PRINSIP UNTUK PERBANKAN, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Laporan ini berfokus pada HSBC sebagai salah satu penyandang dana terbesar sektor kelapa sawit, namun tidak berarti bahwa HSBC merupakan satu-satunya bank yang terkait dengan perusahaan kelapa sawit yang merusak. Kebijakan dan tindakan bank-bank lain juga bermasalah. Penelitian terbaru untuk pemberian peringkat Forest 500 menunjukkan bahwa kurang dari seperlima (18%) dari 150 lembaga keuangan yang dinilai memiliki kebijakan untuk melindungi hutan utuh, bernilai konservasi tinggi (NKT) atau hutan alam.¹⁹

Ketika bank-bank menyediakan pinjaman atau jasa kredit lainnya, potensi terbesar untuk mempengaruhi kelompok usaha kelapa sawit akan meningkat sebelum terjadinya persetujuan untuk menyediakan atau memperbaiki jasa keuangan ini. Bank-bank yang menyediakan layanan jasa seperti ini seharusnya mengikuti prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

- 1. Mengungkapkan rincian dari semua pembiayaan dan jasa keuangan kepada perusahaan kelapa sawit atau kelompok usaha yang memiliki anak perusahaan kelapa sawit**
- 2. Berkomitmen pada kebijakan No Deforestasi, No Gambut dan No Eksploitasi.**
- 3. Bekerjasama dengan klien yang sudah ada untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan tersebut dalam jangka waktu tertentu, menolak untuk membiayai kembali atau memperbaiki layanan lain sampai mereka memenuhinya.**
- 4. Menolak pembiayaan kembali atau memberikan jasa lainnya kepada klien potensial yang tidak mematuhi kebijakan NDPE.**

Investor kelembagaan memiliki kesempatan terus-menerus untuk bekerjasama dengan perusahaan penerima investasi mengenai strategi dan perilaku perusahaan dalam rangka untuk mengevaluasi mitigasi risiko dan manajemen korporat. Dengan demikian, investor kelembagaan yang saat ini memiliki saham pada perusahaan-perusahaan terkait harus mengadopsi prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- 1. Mengungkap rincian seluruh ekuitas dan kepemilikan pendapatan tetap pada perusahaan kelapa sawit atau kelompok usaha yang memiliki anak perusahaan kelapa sawit**
- 2. Berkomitmen pada kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut dan Nol Eksploitasi dalam melakukan investasi yang baru.**
- 3. Bekerjasama dengan perusahaan portofolio yang sudah ada untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan ini dalam jangka waktu tertentu.**
- 4. Divestasi dari perusahaan yang gagal mematuhi kebijakan ini.**

CATATAN AKHIR

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Angka keseluruhan tidak tersedia, namun sebuah kajian baru-baru ini terhadap 25 kelompok usaha kelapa sawit mengidentifikasi HSBC sebagai pemberi pinjaman utama kepada kelompok-kelompok usaha ini selama tahun 2009–2013. Sumber: Winarni dan van Gelder (2014) hal. 15. | 6 Bumitama (2012) | 16 Accreditation Services International (2016) |
| 2 HSBC (2014a, 2014b) | 7 IOI Group (2015a) hal. 254 | 17 Surat HSBC kepada Greenpeace UK, 11 Januari 2017 |
| 3 HSBC (2016c) hal. 3 | 8 Greenpeace International (2008) | 18 HSBC (2016c) hal. 2 |
| 4 Kemen LHK (2015b) | 9 RSPO (2016f) | 19 Global Canopy Programme (2016b) hal. 9 |
| 5 Bumitama Agri Ltd (2016a) hal. 10 | 10 Burrows (2016) | |
| | 11 Noble Group (2015a) | |
| | 12 Suara Papua (2014) | |
| | 13 IndoAgri (2016) hal. 19 | |
| | 14 Centre for Orangutan Protection (2013) | |
| | 15 OPPUK, Rainforest Action Network dan International Labor Relations Forum (2016) | |

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini didasarkan pada informasi dan penelitian asli yang dipublikasikan oleh berbagai individu, layanan informasi, konsultan nirlaba dan organisasi masyarakat sipil lainnya – baik organisasi dari Indonesia maupun organisasi internasional.

GREENPEACE

DITERBITKAN PADA JANUARI 2017 OLEH
GREENPEACE INTERNATIONAL,
OTTO HELDRINGSTRAAT 5
1066 AZ AMSTERDAM
THE NETHERLANDS

ENQUIRIES@GREENPEACE.ORG
WWW.GREENPEACE.ORG
